

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN



**RENJA**  
**RENCANA KERJA**  
**2022**

Jl. Majapahit No. 116 Praya 83511  
Email: [dishub.lomboktengahkab@gmail.com](mailto:dishub.lomboktengahkab@gmail.com)  
Website: [perhubungan.lomboktengahkab.go.id](http://perhubungan.lomboktengahkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun 2022 ini menyajikan informasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan memiliki hasil yang lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan informasi kinerja SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Praya, Januari 2021  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691122 199203 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II</b> <b>EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2019 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Loteng .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah .....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	24
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN Lombok Tengah</b> .....	<b>26</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah .....	26
3.3 Program dan Kegiatan.....	27
<b>BAB IV</b> <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung .....	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rennstra Tahun Anggaran 2019.....	8
Tabel 2.3	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan.....	16
Tabel 2.4	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan .....	19
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 .....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjadi salah satu dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dengan memperhatikan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan *bottom-up* serta perencanaan *top-down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja SKPD adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan strategis jangka pendek SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD. Disebutkan juga bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun

berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Adapun *output* dan *outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit

kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan. Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**  
**(TAHUN ANGGARAN 2020)**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menangani urusan perhubungan dengan jenis pelayanan dasar bidang perhubungan yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah beserta kewenangannya seperti yang tertuang pada Perbup di atas. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 terdapat dua jenis Belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan insentif pemungutan retribusi daerah. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas 5 (lima) program dengan 15 (lima belas) kegiatan yang merupakan anggaran operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun jumlah realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4.833.581.800,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.148.122.466,00 atau mencapai 93,89% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.433.386.366,00	3.137.664.201,00	295.722.165,00	91,39
2	Belanja Langsung	1.714.736.100,00	1.695.917.599,00	18.818.501,00	98,90
	Jumlah	5.148.122.466,00	4.833.581.800,00	314.540.666,00	93,89

Sumber: LRA Dishub TA. 2020

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun Anggaran 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%) (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Thn 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
<p>Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</p> <p>Bidang Urusan : Perhubungan - Dinas Perhubungan</p>																									
1	2.9.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	100.00	264.004.300		124.735.550	100.00	74.612.500	42.116.000	16.257.000	12.030.000	4.209.500	74.612,500											
	2.9.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan akhir DAK	5 persen	264.004.300	3	124.735.550	1.00	74.612.500	0	42.116.000	0	16.257.000	0	12.030.000	1	4.209.500	1	74.612.500	100	100	4	199.348.050	80%	75.51
			Dokumen laporan bulanan	60 persen		36		12.00		3		3		3		3		12		100		48		80%	
			dokumen laporan LKJIP, LPPD	10 persen		6		2.00		2		0		0		0		2		100		8		80%	
			Dokumen laporan semesteran	10 persen		6		2.00		0		1		0		1		2		100		8		80%	
			dokumen laporan triwulan	20 persen		12		4.00		1		1		1		1		4		100		16		80%	

			dokumen laporan triwulan DAK	20 persen		12		4.00		1		1		1		1		4		100		16		80%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100%	100%			40%	75.51%
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah
2	2.9.1.37	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	130.00	57.327.852.550		4.647.064.004	130.00	888.029.850		173.526.100		407.015.200		191.097.500		81.709.750		853,348,550						
	2.9.1.37.13	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Jalan Raya	Pengamanan dan pengawalan haji, pejabat tamu safari ramadhan dan pengamanan lebaran dan hari-hari besar lainnya tahun baru dan expo	60	5.120.710.000	36	929.752.000	12.00	105.517.000	3	28.969.250	3	29.914.000	3	31.140.000	3	15.493.750	12	105.517.000	100	100	48	1.035.269.000	80%	20.22
	2.9.1.37.14	Penataan Lalu Lintas Kawasan	Operational forum LLAJ pengamanan rawan pagi, rawan siang, rawan pasar dan pengaman bau nyale	60	5.216.000.000	36	582.570.500	12.00	82.310.850	3	24.142.350	3	24.763.700	3	25.877.500	3	7.527.300	12	82.310.850	100		48	664.881.350	80%	12.75
	2.9.1.37.15	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah kendaraan yang diuji(kir)	38	9.006.419.000	23	589.805.000	8.00	444.240.000	2	43.900.000	0	207.000.000	3	110.800.000	1	51.100.000	7.05	412.800.000	88.13	92.92	30.05	1.002.605.000	79.08%	11.13
			Kalibrasi sarana dan prasarana PKB	1		1		1.00		0		0		0	1		1		100		2		200%		
			Pengaspalan saranan dan prasaranan PKB	1		1		1.00		1		0		0	0		1		100		2		200%		

			SIM sarana dan prasarana PKB	1		1		0.00		0		0		0		0		0		0		1		100%	
2.9.1.37.8	Pengadaan Fasilitas sarana dan prasarana Keselamatan Jalan		cermin tikungan	9	36.589.723.550	4	2.544.936.504	0.00	255.962.000	0	76.514.500	0	145.337.500	0	23.280.000	0	7.588.700	0	252.720.700	0	98.73	4	2.797.657.204	44.44%	7.65
			ketersediaan rambu jumlah kebutuhan pada jalan kabupaten	475		275		0.00		0		0		0		0						275		57.89%	
			marka	5		0		0.00		0		0		0		0						0		0%	
			pagar pengaman jalan	186		60		0.00		0		0		0		0						60		32.26%	
			patok tikungan	390		190		0.00		0		0		0		0						190		48.72%	
			rambu jalan	475		275		0.00		0		0		0		0						275		57.89%	
			RPPJ	27		22		0.00		0		0		0		0						22		81.48%	
			traffic coen, rambu pengalih arus, road barear, dll	397		124		0.00		0		0		0		0						124		31.23%	
			traffic light	4		0		0.00		0		0		0		0						0		0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			97.63%	97.91%			34.64%	12.94%	

Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	2.9.1.38	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	40.00	11.863.460.930		13.316.066.405	40.00	278.871.600		63.682.100		73.322.350		69.757.950		70.829.200		277.591.600							
	2.9.1.38.15	Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Parkir	140	1.114.509.530	86	131.952.600	25.00	131.952.600	5	24.289.000	7	47.299.950	8	43.929.950	5	15.153.700	25	130.672.600	100	99.03	111	262.625.200	79.29%	23.56	
			Terminal Shelter	4		1		1.00		1		0		0		0		1		100		2		50%		
	2.9.1.38.16	Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Angkutan	Bus Perintis	12	1.062.662.400	5	81.299.000	0.00	81.299.000	0	13.333.900	0	17.098.900	0	17.985.000	0	32.881.200	0	81.299.000	0	100	5	162.598.000	41.67%	15.3	
			Pengawasan dan penertiban angkutan	408		216		96.00		24		24		24		24		96		100		312		76.47%		
			Rekomendasi perizinan bidang perhubungan (perubahan plat nomor dan izin trayek / non trayek)	10		6		2.00		0		0		0		2		2		100		8		80%		
			sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	34		24		6.00		6		0		0		0		6		100		30		88.24%		
	2.9.1.38.3	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Alat sarana dan prasarana angkutan laut dan keselamatan pelayaran	90	9.686.289.000	10	13.102.814.805	0.00	65.620.000	0	26.059.200	0	8.923.500	0	7.843.000	0	22.794.300	0	65.620.000	0		10	13.168.434.805	11.11%	135.95	
			Dermaga tambatan perahu	6		4		0.00		0		0		0		0		0		0		4		66.67%		
			Dokumen perizinan angkutan perairan	1		0		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0%		

			Patroli keselamatan pelayaran	120		24		48.00		12		12		12		12		48		100		72		60%			
			Speed boat	8		4		0.00		0		0		0		0		0		0		4		50%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100%	99.68%					26.19%	58.27%
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Sangat Rendah
4	2.9.1.101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase layanan administrasi kantor	100.00	1.521.186.000		775.856.619	100.00	308.214.150		140.817.090		51.629.086		46.181.173		57.001.780		295.629.129								
	2.9.1.101.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa air	60 persen	38.600.000	36	152.138.025	12.00	81.300.000	3	11.514.675	3	12.578.586	3	11.291.223	3	36.024.458	12	71.408.942	100	139.2	48	223.546.967	80%	579.14		
			Jasa internet	60 persen		36		12.00		3		3		3		3		12		100		48		80%			
			Jasa listrik	60 persen		36		12.00		3		3		3		3		12		100		48		80%			
	2.9.1.101.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	60 persen	253.191.000	36	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	60%	0		
	2.9.1.101.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	60 persen	160.500.000	36	94.548.200	12.00	87.270.000	3	27.740.000	3	28.940.000	3	25.390.000	3	5.200.000	12	87.270.000	100	100	48	181.818.200	80%	113.28		
	2.9.1.101.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bangku	2 persen	298.440.000	0	80.722.350	0.00	48.600.000	0	33.777.000	0	8.200.000	0	2.350.000	0	4.250.000	0	48.577.000	0	99.95	0	129.299.350	0%	43.33		
			kursi kerja/rapat	63 persen		13		0.00		0		0		0		0		0		0		13		20.63%			

			Kursi tamu	5 persen		3		0.00		0		0		0		0		0		3		60%				
			Lemari	14 persen		5		1.00		0		1		0		0		1		100		6		42.86%		
			Meja	5 persen		2		0.00		0		0		0		0		0		0		2		40%		
2.9.1.101.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Petugas Kebersihan Kantor dan Kebersihan Halaman Kantor	2 persen		128.625.500	2	35.796.600	0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	35.796.600	100%	27.83		
2.9.1.101.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	250 persen		559.590.000	131	356.172.444	25.00		52.381.150	10	35.202.415	0	1	5.090.700	8	9.442.072	19	49.735.187	76	94.95	150	405.907.631	60%	72.54	
2.9.1.101.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	60 persen		82.239.500	36	56.479.000	12.00		38.663.000	3	32.583.000	3	1.910.500	3	2.059.250	3	2.085.250	12	38.638.000	100	99.94	48	95.117.000	80%	115.66
Rata-rata capaian kinerja (%)																			96.57%	96.53%				21.08%	169.24%	
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
5	2.9.1.102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana aparaturn kondisi baik	100.00	1.448.282.650		640.310.763	100.00	195.008.000		104.875.461		67.004.350		11.352.000		11.504.009		194.735.820							
	2.9.1.102.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas operational	1 persen	360.000.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	2.9.1.102.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operational	187 persen	720.000.000	117	640.310.763	48.00	195.008.000	38	104.875.461	10	67.004.350	0	11.352.000	0	11.504.009	48	194.735.820	100	99.86	165	835.046.583	88.24%	115.98	

2.9.1.102.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	12 persen	368.282.650	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																100%	99.86%			51.34%	115.98%
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program				19,504,033,341	1,744,736,100	525,016,751	615,227,986	330,418,623	225,254,239	1,695,917,599	0	30.09%		0	0%	0%					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(%)																61.89%	69.36%			0%	0%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			0	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																					

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

**a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Direncanakan**

Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu pada kegiatan:

1. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan;

Pada tahun 2020, jumlah fasilitas keselamatan jalan yang direncanakan pada kegiatan ini dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus meliputi:

- pengadaan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Puyung – Bonjeruk sebanyak 80 buah;
- pengadaan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Batunyale – Sengkol sebanyak 83 buah;
- pengadaan RPPJ pada ruas jalan Bonjeruk – Sintung sebanyak 7 unit;
- pengadaan Pagar Pengaman Jalan pada ruas jalan Puyung – Bonjeruk sebanyak 70 meter

Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena seluruh anggaran kegiatan yang bersumber dari dana DAK mengalami *refocusing* dan realokasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Sehingga target yang direncanakan pada indikator jumlah fasilitas keselamatan jalan tersebut tidak dapat tercapai.

2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan;

Pada kegiatan ini jumlah sarana angkutan laut yang direncanakan berupa *speedboat* sebanyak 1 (satu) unit yang bersumber dari dana DAK. Namun seperti yang telah diuraikan di atas bahwa seluruh kegiatan yang bersumber dari dana DAK mengalami *refocusing* dan realokasi untuk penanganan Covid-19, maka kegiatan pengadaan *speedboat* ini juga tidak dapat dilaksanakan.

3. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;  
 Pada kegiatan ini terdapat indikator yang tidak dapat tercapai yaitu pelaksanaan Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar yang semula akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII – Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun karena pandemic global Covid-19 maka BPTD Wilayah XII tidak menyelenggarakan semua jenis diklat pada tahun anggaran 2020.

Tidak terpenuhinya *output* pada beberapa kegiatan di atas tentu saja berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut di atas tentu saja harus menjadi catatan penting pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

**b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target yang Direncanakan**

Program/kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan**

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening air, listrik, telepon (internet)	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
4	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
		Printer	2 bh	2 bh	100	Memenuhi target
		Lemari	1 bh	1 bh	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
		Kamera DSLR	1 set	1 set	100	Memenuhi target
5	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dokumen hasil perjalanan dinas	58 dok	58 dok	100	Memenuhi target
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	-	Anggaran mengalami refocusing
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan berlakunya surat kendaraan dinas	38 unit	38 unit	100	Memenuhi target
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
8	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LPPD/LKjIP	2 dok	2 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen Renja	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan bulanan	12 dok	12 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan tahunan	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan e-Monev	12 dok	12 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen laporan triwulan DAK	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen SPIP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>					
9	Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Angkutan	Pengawasan dan Penertiban Angkutan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
10	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Patroli Keselamatan Pelayaran	32 kl	32 kl	100	Memenuhi target
11	Kegiatan Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Penertiban Parkir	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan</b>					

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
<b>Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan</b>						
12	Kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, dan Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	Anggaran mengalami refocusing
		Sosialisasi	5 kl	5 kl	100	Memenuhi target
		Perlengkapan Jalan, Kendaraan, dan Tata Cara Berlalu Lintas				
		Pemeliharaan Traffic Light	8 titik	8 titik	100	Memenuhi target
		Diklat APILL	-	-		Anggaran mengalami refocusing
13	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pengendalian dan Pengamanan Saat Insidentil	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
14	Kegiatan Penataan Lalu Lintas Kawasan	Patroli LLAJ	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
15	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Kalibrasi Alat Uji	6 unit	6 unit	100	Memenuhi target
		Jumlah Kendaraan yang diuji	7700 unit	7039 unit	91,42	Tidak memenuhi target
		Upgrading Alat Uji PKB	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Diklat PKB Dasar	1 kl	-	-	Tidak memenuhi target

*Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2020*

Dengan terpenuhinya hampir 90% program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diharapkan hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat dalam memenuhi sasaran kegiatannya seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

### **c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan**

Pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan, karena pada tahun anggaran 2020 terjadi refocusing dan

realokasi anggaran yang mengakibatkan penyesuaian target sesuai dengan yang dapat dicapai dalam kondisi pandemi global Covid-19.

**Tabel 2.4 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan**

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
-	-	-	-	-	-	-

*Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2019*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah**

Untuk tahun 2020, pembangunan bidang perhubungan khususnya terkait masalah transportasi diprioritaskan pada sasaran untuk menurunkan angka kecelakaan melalui kebijakan penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan layanan angkutan. Secara umum hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

### **1. Pengembangan Jaringan Jalan**

#### **1) Peningkatan Jalan Eksisting**

##### **a. Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan**

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah hanya fokus pada pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan khususnya pada pemeliharaan traffic light pada 8 (delapan) simpang. Karena pada tahun anggaran tersebut tidak ada pengadaan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan oleh terjadinya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19, dimana seluruh anggaran untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas, RPPJ, dan pagar pengaman jalan yang bersumber dari dana DAK dihapus.

b. Manajemen lalu lintas, yaitu dengan pemberlakuan titik-titik ruas jalan dilarang parkir ataupun dilarang berhenti, terutama pada ruas jalan dalam Kota Praya. Pada musim pandemi juga dilakukan patroli secara lebih intensif yang ditujukan untuk memantau kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

2) Penataan Simpang

a. Melakukan penutupan simpang pada Jalan Gajah Mada untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas;

b. Pemasangan rambu peringatan simpang, rambu hati-hati, serta rambu batas kecepatan.

2. Manajemen Perparkiran

1) Melakukan penyusunan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;

2) Penetapan daerah-daerah dilarang parkir pada badan jalan, terutama pada ruas jalan dalam Kota Praya. Hal ini dilakukan dengan menempatkan rambu-rambu larangan parkir serta melakukan pembinaan, penertiban, dan pengawasan parkir oleh petugas dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian;

3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mengelola parkir berkaitan dengan peraturan maupun terkait hak dan kewajiban mengenai perparkiran.

3. Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

1) Pengembangan jalur angkutan umum untuk menjangkau seluruh kawasan Kabupaten Lombok Tengah dengan membuka jalur keperintisan angkutan jalan dengan trayek perintis: Praya-Kute-Awang dan Praya-Kute-Selong Belanak;

- 2) Mendorong ketertiban dan kedisiplinan rute Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melalui operasi-operasi penertiban angkutan beserta ijin operasionalnya dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian;
  - 3) Melakukan penertiban pada Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo) terkait kedisiplinan para kusir cidomo terhadap rute yang sudah ditetapkan dan melakukan pemeriksaan terkait ketersediaan perlengkapan yang harus dimiliki seperti kantong kotoran kuda. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Satpol-PP Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Barang
- 1) Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan di jalan serta mendorong perusahaan swasta untuk memiliki jembatan timbang untuk mengukur berat kendaraannya sebelum keluar ke jalan umum;
  - 2) Melakukan pengujian kendaraan angkutan barang secara ketat dan melaksanakan operasi kelaikan kendaraan angkutan barang secara berkala;
  - 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha dan operator angkutan barang.

5. Peningkatan Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada tahun anggaran 2020, fokus kegiatan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pada upaya terakreditasinya UPTD PKB sebagai syarat untuk melanjutkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di tahun 2021. Karena berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.502/33/7/DRJD/ 2020 Tanggal 17 November 2020 menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat dioperasikan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.

Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2020 UPTD PKB telah melakukan berbagai persiapan untuk memenuhi persyaratan akreditasi yaitu antara lain:

- melakukan upgrading/setting pada alat uji Brake Tester dan Axle Load Meter
- pengkalibrasian pada 6 (enam) alat uji utama
- penembokan lanjutan halaman kantor UPTD PKB
- mempersiapkan anggaran pada tahun 2021 untuk memenuhi kelengkapan persyaratan lainnya, yaitu: anggaran untuk pengadaan perangkat smart card, pengadaan Buku Lulus Uji Elektronik (BLUe), rehab gedung uji, penembokan lanjutan, pengadaan dan pemasangan alat uji Side Slip Tester dan Tint Tester, dll.

Atas berbagai upaya tersebut UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah akhirnya berhasil meraih akreditasi B dari Kementerian Perhubungan, sehingga pada tahun 2021 UPTD PKB dapat terus melakukan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

#### 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Pada tahun 2020, pengadaan 1 (satu) unit speedboat yang direncanakan tidak dapat terlaksana. Hal ini terjadi karena anggaran pengadaan speedboat yang bersumber dari DAK ini mengalami refocusing dan realokasi untuk penanganan wabah Covid-19. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah speedboat yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tetap sebanyak 4 (empat) unit yang merupakan hasil pengadaan speedboat tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 2 (dua) unit.

Dari penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 maka dapat dicapai indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang disajikan dalam Tabel 2.6 berikut ini:

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Pemasangan rambu lalu lintas	bh	105	100	70	100	105	100	70	-
2	Pengecatan marka jalan	m <sup>2</sup>	1606	1000	-	1000	-	-	-	-
3	Pemasangan pagar pengaman jalan	m	-	62	-	62	-	60	-	-
4	Pemasangan RPPJ	bh	12	10	-	5	12	10	-	-
5	Pemasangan cermin tikungan	bh	-	4	-	5	-	4	-	-
6	Pemasangan traffic light	unit	2	-	-	1	-	-	-	-
7	Pemasangan patok tikungan	bh	40	100	50	100	40	100	50	-
8	Alat bantu keselamatan (traffic cone, road barrier, rambu pengalih arus, dll)	bh	-	130	71	96	-	130	40	-
9	Pengamanan dan pengawalan haji, pejabat/tamu daerah, safari Ramadhan, pengamanan lebaran dan hari-hari besar lainnya, tahun baru, dan expo	bl	12	12	12	12	12	12	12	12
10	Operasional FLLAJ, pengamanan rawan pagi, rawan pasar, Bau Nyale	bl	12	12	12	12	12	12	12	12
11	Dokumen pelayanan angkutan umum	dok	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	dok	-	1	-	-	-	-	-	-
13	Dokumen RIT	dok	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Dokumen Kajian Asal-Tujuan Perjalanan	dok	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dokumen Tatralok	dok	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SIM-PKB	unit	-	1	-	-	-	1	-	-
17	Pengaspalan PKB	pkt	-	-	1	-	-	1	1	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
18	Kalibrasi PKB	kl	-	-	1	-	-	-	1	1
19	Terminal/shelter	bh	-	-	-	1	-	-	-	-
20	Parkir	titik	122	127	132	137	100	80	54	74
21	Rekomendasi perijinan bidang perhubungan (perubahan plat nomor dan ijin trayek/non trayek)	jenis	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Pengawasan dan penertiban angkutan	kl	60	60	96	96	60	60	96	96
23	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	kl	-	-	2	16	-	-	2	-
24	Bus perintis	unit	-	-	5	4	-	-	5	-
25	Dokumen perijinan angkutan perairan	dok	-	-	-	1	-	-	-	-
26	Patroli keselamatan pelayaran	kl	-	-	24	48	-	24	24	48
27	Alat keselamatan pelayaran	bh	10	-	90	90	-	10	-	-
28	Dermaga tambatan perahu	bh	2	-	2	1	2	-	2	-
29	Speed boat	bh	-	2	2	2	-	2	2	-

*Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2019*

### **1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya sumber daya manusia di Bidang Perhubungan
2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan di kecamatan. Permasalahan ini berkaitan dengan tidak beroperasinya

sebagian besar trayek yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Lombok Tengah dan masih kurangnya pelayanan Terminal Tipe C (Terminal Mujur).

3. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang masih minim dibandingkan dengan jumlah ruas jalan kabupaten
4. Belum optimalnya pelayanan parkir
5. Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan yang masih cukup tinggi
6. Tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yaitu:

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
  - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang semakin meningkat
  - Dijadikannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Super Prioritas dan adanya agenda perhelatan akbar MotoGP pada tahun 2021
  - Meningkatnya rute dan volume penerbangan yang dilayani oleh Bandara Internasional Lombok
  - Besarnya intensitas penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Lombok Tengah
  - Pusat aktivitas yang belum merata
- b. Peluang yang ada antara lain:
  - Adanya regulasi yang memadai
  - Adanya keterbukaan informasi publik, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  - Adanya sinergi terkait strategi dan upaya penanganan masalah transportasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberikan dukungan maksiman bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia, dan peraturan perundang-undangan) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan transportasi di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah**

Visi Kabupaten Lombok Tengah adalah “terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang didukung oleh sistem transportasi yang cepat, aman, nyaman, lancar, mantap dan tangguh”. Untuk

mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan Misi Dinas Perhubungan kabupaten Lombok Tengah yaitu:

1. Mempercepat/meningkatkan infrastruktur transportasi dalam mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata;
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan transportasi;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan tersedianya infrastruktur dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Kemudian dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah adalah sesuai dengan Misi Nomor 4 Pemerintah Daerah yaitu "pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas" dengan sasaran "meningkatnya keselamatan lalu lintas".

Dengan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terus mengupayakan agar keselamatan lalu lintas di jalan dapat ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan LLAJ yang dapat dicapai dengan:

1. menyediakan fasilitas keselamatan jalan
2. meningkatkan kinerja layanan pengujian kendaraan bermotor
3. menertibkan parkir
4. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas
5. meningkatkan pelayanan angkutan dengan cara menormalisasi trayek angkutan umum dan meningkatkan sarana dan prasarana terminal
6. meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam berlalu lintas
7. menerbitkan perijinan angkutan laut

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan 2 Program dengan 8

kegiatan dan 11 sub kegiatan prioritas Urusan Perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:

1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

2) Kegiatan Pengeloaan Termnal Penumpang Tipe C, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

3) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prsarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

6) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

7) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan:

- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu ditetapkan 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan Penunjang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- c) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				6.583.887.121	DAU			7.242.275.833
2	15	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Diselesaikan Tepat Waktu	Dishub Kab. Loteng	34	dok	64.599.980	DAU		71.059.978
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	4	dok	29.367.000	DAU	32.303.700
					Dokumen RKA		1	dok				
					Dokumen DPA		1	dok				
					Dokumen DPPA		1	dok				
					Dokumen Renja		1	dok				
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	30	dok	35.232.980	DAU	38.756.278
					Dokumen LKJIP		1	dok				
					Dokumen LKPJ		1	dok				
					Dokumen LPPD		1	dok				
					Dokumen Profil Perhubungan		1	dok				
					Dokumen SPIP		1	dok				
					Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi		4	dok				
					Laporan Bulanan		12	dok				
					Laporan Triwulan		4	dok				
					Dokumen Laporan Triwulan dan Tahunan DAK		5	dok				
2	15	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi keuangan	Dishub Kab. Loteng	12	bulan	4.158.328.784	DAU		4.574.161.662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Insentif Pemungutan Retribusi	Dishub Kab. Loteng	12	bulan	4.136.236.984	DAU	4.549.860.682
					Gaji Pokok ASN		1	tahun				
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja		1	tahun				
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Insentif Pemungutan Retribusi)		1	tahun				
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan SKPD yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	15	dok	22.091.800	DAU	24.300.980
					Laporan Keuangan Bulanan		12	dok				
					Laporan Keuangan Semesteran		2	dok				
					Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	dok				
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					258.922.300	DAU	284.814.530
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Dishub Kab. Loteng	147	stel	80.850.000	DAU	88.935.000
					Pakaian Dinas beserta Atribut		147	stel	80.850.000			
2	15	01	2.05	08	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan laporan penatausahaan BMD yang tersusun	Dishub Kab. Loteng	16	dok	12.214.000	DAU	13.435.400
					Laporan Kepegawaian		12	dok				
					Laporan BMD		4	dok				
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis	Luar Daerah	7	org	165.858.300	DAU	182.444.130
					Diklat PKB Lanjutan		1	ok	25.349.500			
					Diklat Perencanaan Transportasi		1	ok	32.000.000			
					Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas		1	ok	18.208.300			
					Diklat Andalalin		1	ok	21.633.500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Diklat Perencanaan Jaringan Trayek		1	ok	21.633.500			
					Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal		1	ok	21.633.500			
					Diklat Orientasi Pelabuhan		1	ok	25.400.000			
2	15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana kebutuhan kantor</b>	<b>Dishub Kab. Loteng</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>461.789.932</b>	<b>DAU</b>	<b>507.968.925</b>
2	15	01	2.06	02	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</b>	<b>Dishub Kab. Loteng</b>			<b>318.088.932</b>	<b>DAU</b>	<b>349.897.825</b>
					Laptop		3	buah	30.000.000			
					Printer		3	buah	10.500.000			
					ATK		1	paket	36.716.355			
					Materai		200	lbr	2.000.000			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1	paket	3.366.000			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		1	paket	5.024.400			
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1	paket	5.006.584			
					Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		12	bulan	3.900.000			
					Belanja Pemeliharaan; AC, Laptop/PC, Printer		12	bulan	6.620.000			
					Meja Kerja Pejabat Es III		3	buah	18.000.000			
					Meja Kerja 1/2 Biro		10	buah	25.774.000			
					Kursi Kerja Pejabat Es II		1	buah	7.674.209			
					Kursi Kerja Pejabat Es III		3	buah	11.841.864			
					Kursi Kerja Pejabat Es IV		10	buah	22.552.250			
					Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		30	buah	28.995.750			
					Gorden Roller Blind		30	m	14.550.000			
					AC		4	unit	27.599.000			
					TV (untuk kantor dan UPTD PKB)		2	unit	3.400.000			
					Pembuatan Space baliho		1	unit	47.500.000			
					Speaker Aktif		1	unit	7.068.520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat	12	bulan	37.905.000	DAU		41.695.500
						Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Dinas	12	bulan	37.905.000			
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terlaksana	Luar Daerah	111	ok	105.796.000	DAU	116.375.600
						Perjalanan Dinas Es II	5	ok	43.810.000			
						Perjalanan Dinas Es III	3	ok	21.948.000			
						Perjalanan Dinas Es IV	4	ok	27.168.000			
						Perjalanan Dinas ke Provinsi	99	ok	12.870.000			
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.203.291.000	DAU		1.323.620.100
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang	Dishub Kab. Loteng	4	unit	583.169.000	DAU	641.485.900
						Kendaraan Dinas R4 Patwal		1	unit	488.169.000		
						Kendaraan Dinas R2 Patwal		2	unit	70.000.000		
						Kendaraan Dinas R2 Es IV		1	unit	25.000.000		
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gudang kantor		36	m	167.760.000	DAU	184.536.000
						Pembangunan Gudang untuk Perlengkapan PJU dan Rambu-rambu Lalu Lintas		36	m	167.760.000		
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertatanya halaman kantor	Dishub Kab. Loteng	2	paket	452.362.000	DAU	497.598.200
						Penataan halaman kantor		700	m	166.242.000		
						Penataan tempat parkir kantor		32	m	149.120.000		
						Pembuatan dinding partisi kantor		500	m2	137.000.000		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya pelayanan kantor	Dishub dan UPTD PKB Kab. Loteng			130.616.125	DAU	143.677.738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, air, dan internet	Dishub dan UPTD PKB Kab. Loteng	12	bulan	85.720.125	DAU	94.292.138
					Jasa Listrik		41000	kwh	60.147.000			
					Jasa Air		925	m3	6.313.125			
					Jasa internet		12	bulan	19.260.000			
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tim Penanggung jawab Pengelola Keuangan	Dishub Kab. Loteng	1	tahun	44.896.000	DAU	49.385.600
					Honorarium PPK DAU							
					Honorarium PPK DAK							
					Honorarium Bendahara Pengeluaran							
					Honorarium Bendahara Penerimaan							
					Honorarium Tenaga Kebersihan							
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah			306.339.000	DAU		336.972.900
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang laik pakai	Dishub Kab. Loteng	41	unit	306.339.000	DAU	336.972.900
					Biaya BBM		10560	liter				
					Biaya Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		41	unit				
					Biaya Pemeliharaan		41	unit				
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Dishub Kab. Loteng	1	paket	-	DAU	-
					Rehab Berat Gedung Kantor		0	m2	-			-
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				16.391.341.000	DAU & DAK		18.030.475.100
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				12.987.400.000	DAU		14.286.140.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				12.896.600.000	DAU		14.186.260.000
					Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas	Ruas jalan Penujuk - Mangkung	80	buah	120.000.000			
						Ruas jalan Mangkung - Selong Belanak	80	buah	120.000.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	5 Desa Wisata	5	buah		75.000.000		
					Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan	Ruas jalan Penujak - Mangkung	4	buah		28.000.000		
						Ruas jalan Mangkung - Selong Belanak	4	buah		28.000.000		
					Bahan Material PJU	Dishub Kab. Loteng	1	paket		150.000.000		
					Alat Perlengkapan Teknisi PJU	Dishub Kab. Loteng	1	paket		30.000.000		
					Sosialisasi Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	1	paket		30.000.000		
					Jasa Tukang: Teknisi PJU		20	org		216.000.000		
					Jasa Tukang: Teknisi Traffic Light		1	org		12.000.000		
					Jasa Tukang: Pengawasan PJU		12	org		57.600.000		
					Pembayaran Listrik PJU		12	bln		12.000.000.000		
					BBM dan Makan Minum Pengawasan dan Pengendalian PJU		12	bln		30.000.000		
2	15	02	2.02	04	<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	<b>Terpeliharanya Perlengkapan Jalan</b>				<b>90.800.000</b>	<b>DAU</b>	<b>99.880.000</b>
					Suku Cadang Traffic Light		1	paket		50.000.000		
					Jasa Tukang: Pengawasan Paskes		6	org		28.800.000		
					BBM dan Makan Minum Pengawasan Fasilitas Keselamatan Jalan		12	bln		12.000.000		
2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Peningkatan Prasarana Terminal Penumpang Tipe C</b>				<b>162.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>178.200.000</b>
2	15	02	2.03	08	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal</b>	<b>Sarana dan Prasarana Terminal Muju r</b>	<b>Terminal Muju r</b>			<b>162.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>162.000.000</b>
					Pengaspalan Terminal Muju r		1	paket		150.000.000		
					BBM dan Makan Minum Penertiban Terminal		12	bulan		12.000.000		
2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>					<b>90.600.000</b>	<b>DAU</b>	<b>99.660.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			90.600.000	DAU			99.660.000
					BBM dan Makan Minum Penertiban Parkir		12	24.000.000				
					Jasa Tukang Petugas Penertiban Parkir		12	57.600.000				
					Pengadaan Rompi Parkir		50	9.000.000				
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			706.100.000	DAU			776.710.000
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			450.000.000	DAU			495.000.000
					Pengadaan Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer Tester)		1	350.000.000				
					Pembangunan Tembok PKB		1	100.000.000				
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			137.500.000	DAU			151.250.000
					Pengadaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)		5500	137.500.000				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			118.600.000	DAU			130.460.000
					Biaya Kalibrasi		8	8.000.000				
					Biaya Pendampingan Kalibrasi		1	21.000.000				
					Biaya Pemeliharaan Alat Uji		8	44.000.000				
					Jasa Tukang Teknisi Alat Uji dan Operator SIM PKB		7	33.600.000				
					BBM dan Makan Minum Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor		12	12.000.000				
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			96.000.000	DAU			105.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			96.000.000	DAU			105.600.000
					BBM dan Makan Minum Pengawasan Saat Insidentil		12	bulan	24.000.000			
					Jasa Tukang Petugas Pengawasan Saat Insidentil		15	org	72.000.000			
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			90.000.000				99.000.000
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uj Berkala Kendaraan Bermotor			90.000.000				99.000.000
					BBM dan Makan Minum Patroli LLAJ		12	bulan	12.000.000			
					Jasa Tukang Petugas Patroli LLAJ		10	org	48.000.000			
					Honor PTT		5	org	30.000.000			
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.259.241.000				2.485.165.100
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			2.259.241.000				2.485.165.100
					Pengadaan Sarana Transportasi Darat	Kab. Lombok Tengah	4	unit	2.200.000.000	DAK		
					Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Lombok Tengah	5	kl	8.425.000	DAK		
					Honor Tim Penertiban dan Pengawasan Ijin Angkutan dan jalur Lintas Angkutan Barang (dari Kepolisian)	Kab. Lombok Tengah	1	org	6.300.000			
					Jasa Tukang Sopir Angkutan Perintis	Kab. Lombok Tengah	4	org	19.200.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Luar Daerah	2	ok				
					BBM dan Makan Minum Penertiban Angkutan	Kab. Lombok Tengah	12	bln				
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran							
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota							
					BBM Penertiban dan Pengawasan Ijin Angkutan Laut	Kab. Lombok Tengah	2400	liter				
					Oil Speedboat	Kab. Lombok Tengah	120	liter				
					Biaya Makan Minum	Kab. Lombok Tengah	500	org				
					Jasa Tukang Penertiban dan Pengawasan Angkutan Laut	Kab. Lombok Tengah	5	org				
					Diklat Kru Kapal	Kab. Lombok Tengah	120	org				
					Pemeliharaan Speedboat	Kab. Lombok Tengah	4	unit				
TOTAL PAGU												
									23.127.608.121			25.440.368.933

Praya, 21 Januari 2021  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SOPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691122 199203 1 004

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan maupun terminal yang memadai, terutama pada saat gelaran event nasional maupun internasional di KEK Mandalika
2. Perlunya perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terutama untuk persyaratan peningkatan akreditasi dan layanan kepada masyarakat
3. Perlunya Langkah-langkah inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi/angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah
4. Pengembangan transportasi laut selain diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan, adalah sebagai sarana dan prasarana penunjang perkembangan KEK Mandalika.

Untuk mencapai keberhasilan dari program Rencana Kegiatan ini, maka capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Praya, 21 Januari 2021  
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691122 199203 1 004